

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. 1991. *Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bryson, J. M. 2018. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, T. 2020. *Kebijakan Publik dan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldaña, J. 2024. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rangkuti, F. 2017. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rogers, E. M. 2003. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Sedarmayanti. 2014. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. 2020. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington DC: World Bank.

World Bank. (2022). Digital Identity and Public Service Delivery. Washington DC: World Bank.

Bappenas. (2022). Digitalisasi Administrasi Kependudukan dalam Mendukung Satu Data Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 6(2), 45–60.

Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 1–15.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026.

PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Dokumen Resmi Daerah:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. (2025). Profil dan Laporan Kinerja Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. (2021). Dokumen Inovasi Pelayanan Publik e-PAKLADI.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. (2025).

Paparan Zona Integritas Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan.

